

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hidayat Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. Jurnal Sejarah Citra Lekha, Universitas Diponogoro Semarang 2014

Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta: 2014,

Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung: Mandar Maju, 1995

Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011,

Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005),

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal.30

Barda Nawawi Arief., Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Roni Wiyanto, S.H.,M.H. Asas – asas hukum pidana Indonesia (mandara maju/2012/Bandung)

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, 185.

SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwensi, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996

Prajudi Atmosudirjo, 2005, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta.

Dr. H.salim HS, SH.,MS, Erlies Septianana Nurbani, SH.,LLM., Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok - 2013)

Wirjono Prodjodikoro berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia

Yasona Laoly dalam berita berjudul [Perlu Penegasan Norma Ultimatum Remedium Soal Pengenaan Sanksi di Aturan Turunan UU Cipta Kerja](#)

Dr. H.salim HS, SH.,MS, Erlies Septianana Nurbani, SH.,LLM., Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok - 2013)

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta,

ARTIKEL / KARYA ILMIAH LAINNYA

Syafnidawaty 23 October 2020 TUJUAN PENELITIAN diakses melalui <https://raharja.ac.id/2020/10/23/tujuan-penelitian/>

Zaenul Mahmudi 2022 EFEKTIFITAS PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI SISTEM

Jimmi Dohar Pandapotan, 2025

REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERTAMBAHAN BAWAH TANAH (Perkara Nomor 5499 K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP) 105

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN Kabilah Jurnal Social of
Community volume 7 no.1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945
Undang – Undang nomor 3 tahun 2020 Jo. Undang
– Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara

Undang – Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara

Peraturan Pemerintah nomor Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang.

Peraturan Pemerintah RI nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi
Geospasial

Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah
pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu
bara

Peraturan ESDM nomor 33 tahun 2015 tentang tata cara pemasangan tanda batas
wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan
khusus mineral dan batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral RI nomor 1825 K/ 30/
MEM/ 2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha
Pertambanagn atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi
Produksi